

Laporan Hasil Penelitian

**PENGARUH SOSIALISASI DAN PEMBERIAN KOMPENSASI
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KECAMATAN BALIGE KABUPATEN TOBASAMOSIR**

Oleh :

**Dr. Timbul Sinaga, SE., MSA
Sirianto Pasaribu**



**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
MEDAN
2019**

PENGESAHAN HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Pengaruh Sosialisasi Dan Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir

Jenis Penelitian : Terapan

Ketua Peneliti :

- a. Nama Lengkap : Dr Timbul Sinaga, S.E., MSA.
- b. NIDN : 0113076201
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Jabatan Struktural : -
- e. Golongan/Pangkat : IVA /Pembina
- f. Program Studi : Magister Manajemen

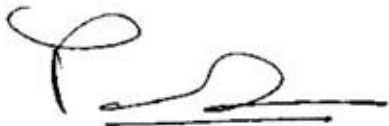
Anggota Peneliti :

- a. Nama Lengkap : Sirianto Pasaribu
- b. NPM : 1810101102

-
- Lama Penelitian : 4 Bulan (Mei s/d Agustus 2019)
 - Lokasi Penelitian : Kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir
 - Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - Sumber Biaya Penelitian : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Medan, Agustus 2019

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Dr. Pantas H. Silaban, SE.,M.Si

Ketua Peneliti



Dr Timbul Sinaga, SE.,M.SA

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak dan kompensasi secara parsial dan simultan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala desa yang ada di kecamatan Balige yang berjumlah 37 orang seluruh populasi tersebut dijadikan sampel dalam penelitian ini. Daftar pertanyaan dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas, data diolah dengan bantuan program SPSS versi 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige sedangkan kompensasi tidak berpengaruh signifikan. Secara serempak variabel Sosialisasi pajak dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige.

Kata kunci :Sosialisasi, Kompensasi, Kinerja, Pajak Bumi dan Bangunan, Desa.

DAFTAR ISI

	Halama n
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
.....	
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Pustaka	7
2.1.1. Teori tentang Pajak	7
2.1.2. Teori tentang Sosialisasi	16
2.1.3. Teori tentang Kompensasi.....	21
2.1.4. Teori tentang kinerja	27
2.2. Kerangka Berpikir	30
2.3. Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis penelitian	33
3.2. Variabel dan Defenisi Operasional	33

3.3. Sumber data, Subjek dan Objek Penelitian.....	34
3.4. Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel.....	35
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6. Teknik analisis Data.....	36
3.7. Uji Asumsi Klasik.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Profil Kecamatan Balige	41
4.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	44
4.3. Penjelasan Variabel Penelitian.....	50
4.4. Uji asumsi klasik	55
4.5. Hasil penelitian	59
4.5.1. Koefisien Determinasi.....	59
4.5.2. Uji Serempak (F).....	60
4.5.3. Uji Parsial (t).....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Nomor	Tabel	Halaman
3.1.	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	34
4.1.	Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak	46
4.2.	Hasil Uji Validitas Variabel Kompensasi	47
4.3.	Hasil Uji Validitas Variabel kinerja.....	48
4.4.	Hasil Uji Reliabilitas	50
4.5.	Penjelasan responden atas Variabel sosialisasi pajak.....	50
4.6.	Penjelasan responden atas Variabel Kompensasi	52
4.7.	Penjelasan responden atas Variabel kinerja.....	53
4.8.	Hasil Uji Multikolinearitas	57
4.9.	Koefisien Determinan (R^2).....	59
4.10.	Uji Serempak (Uji F)	61
4.11.	Uji Parsial (Uji t)	62

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Gambar	Halaman
2.1.	Kerangka Berpikir	31
4.1.	Peta Kecamatan Balige Kab. Tobasamosir.....	42
4.2.	Hasil Uji Normalitas Histogram	55
4.3.	Hasil Uji Normalitas (P-P Plot).....	56
4.4.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	58

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Kuesioner Penelitian	71
2.	Hasil Uji Statistik	74
2.	Hasil Uji Statistik	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber penerimaan Negara yang jumlahnya cukup besar untuk itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah berusaha keras untuk meningkatkan realisasi penerimaan Negara dari pajak bumi dan bangunan dengan mempedomani undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dalam rangka pembangunan baik itu pembanguan jangka pendek maupun pembangunan jangka panjang maka Negara tentunya memerlukan biaya untuk merealisasikannya.

Selain masalah pem,bangunan nnegara juga perlu memastikan berjalanya penyelenggaraan pemerintahan dengannbaik yang dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah, dan tentunya penyelenggaraan pemerintahan memerlukan biaya untuk melaksankannya mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

Dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaran Negara salah satu upaya pemerintah adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain. Dengan digulirkannya reformasi dibidang perpajakan yang ditandai dengan

duundangkannya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang – Undang Nomer 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disamping itu juga Undang – Undang Nomer 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomer 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari Undang – Undang tersebut terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam perpajakan.

Adanya perubahan menimbulkan akses yang besar bagi wajib pajak. Salah satunya adalah menurunnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya karena dasarnya atau ada kecenderungan wajib pajak merasa keberatan kalau harta yang telah dikumpulkan atau diperoleh sebagian disetorkan kepada negara.

Untuk menjelaskan berbagai hal tentang pajak Negara biasaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan harapan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan meningkatnya pendapatan pemerintah dari sector pajak. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan Kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam hal pembayaran pajak baik dari segi waktu maupun jumlah yang harus dibayarkan.

Pada kenyataannya sampai sekarang masih banyak warga Negara termasuk masyarakat Tobasamosir yang belum paham dengan pajak, dan yang paling sering adalah masih banyak masyarakat di kabupaten Tobasamosir yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak, situasi ini tentunya mengakibatkan rendahnya pendapatan Negara dari sektor pajak.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu wajib pajak yang hidup bernasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita – cita rakyat / penduduk hidup dalam negara yang adil dan makmur dalam lingkup nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945. Setiap rakyat/penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi.

Masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat dikabupaten Tobasamosir sehubungan dengan pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan saat ini banyak masyarakat yang tidak bias bayar pajak bumi dan bangunan karena alasan kepemilikan tanah atau bangunan tidak sesuai nama dengan yang tertera pada sertifikat, karena berbagai macam alasan seperti kesulitan melakukan mutasi, rendahnya kesadaran mengenai status kepemilikan tanah, ketidaksesuaian luas pada surat pemberitahuan pajak terutang, SPPT dengan sertifikat,

Selain itu sosialisasi jarang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tobasamosir juga menjadi salah satu penyebab rendahnya keinginan masyarakat untuk membayar pajak di kabupaten Tobasamosir.

Sosialisasi tentang pajak yang dilakukan oleh aparat desa juga masih kurang dikontrol oleh pemerintah kabupaten Tobasamosir sehingga hasil dari sosialisasi yang diberikan belum maksimal yang mengakibatkan pengkat desa khususnya kepala desa kewalahan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Pemerintah kabupaten Tobasamosir selalu memacu setiap kepala desa untuk lebih aktif dalam pemungutan pajak agar penerimaan dari sektor pajak dapat meningkat, pemerintah juga melakukan berbagai program kepada kepala desa agar mampu memungut pajak dengan benar termasuk pemberian kompensasi kepada kepala desa yang berprestasi dalam memungut pajak di daerahnya masing-masih.

Dari latarbelakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan dengan membahas variabel-variabel yang dibahas dalam latar belakang diatas yaitu variabel sosialisasi, pemberian kompensasi dan juga variabel kinerja aparatur sipil negara dengan judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Sosialisasi dan Pemberian Kompensasi terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir?
2. Bagaimana pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak dan pemberian kompensasi terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir secara simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

4. Menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir.
5. Menganalisis pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir.
6. Menganalisis pengaruh sosialisasi pajak dan pemberian kompensasi terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir secara simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pimpinan Dinas pendapatan kabupaten Tobasamosir menjadi masukan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak Bumi dan Bangunan.
2. Bagi Sekolah Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, merupakan tambahan kekayaan penelitian studi kasus untuk dapat dipergunakan dan dikembangkan untuk keperluan program studi ataupun keperluan umum.
3. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan pengetahuan yang dimiliki akan bertambah luas terutama mengenai pajak.
4. Bagi Peneliti berikutnya, sebagai referensi dalam melakukan penelitian terutama mengenai sosialisasi pajak dan pemberian hadiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Tentang Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat yang sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak sesuai dengan aturan Negara, pajak yang merupakan iuran tersebut digunakan untuk keperluan umum bukan keperluan pribadi.

Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat umum dan untuk menjalankan pemerintahan. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah.

Berdasarkan dari *Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983* yang kemudian disempurnakan dengan *UU No. 28 Tahun 2007* tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Waluyo (2008:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,

dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan menurut Mardiasmo (2009:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2.1.1.2. Jenis-jenis Pajak

Menurut Sifatnya (Mardiasmo, 2003 : 5). Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pajak Subyektif. Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak Obyektif. Pajak Obyektif adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Menurut Pemungutannya Pengelompokan Pajak adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2003 : 6).

- a. Pajak Pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PBB.

Pajak negara (pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar

di seluruh Indonesia. Contoh pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea masuk, cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak migas, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- b. Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame.

Pajak daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini terbatas hanya untuk rakyat daerah itu sendiri dan dilakukan oleh Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak tontonan, pajak radio, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar dan masih banyak lainnya.

Dari cara pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

1. **Pajak langsung (*Direct Tax*)** merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Surat ketetapan pajak ini memiliki keterangan jumlah yang perlu dibayar wajib pajak. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jadi Anda tidak dapat melimpahkan pajak dari penghasilan Anda kepada teman atau relative Anda.

2. **Pajak tidak langsung (*Indirect Tax*)** adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini ditagihkan berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, jadi tidak dibayar secara berkala. Pemerintah memungut pajak ini jika peristiwa tersebut terjadi oleh wajib pajak. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, dan cukai. Jadi jika Anda menjual barang mewah maka Anda dapat mengalihkan pajak penjualan atas barang mewah kepada sang pembeli.

2.1.1.3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Rahmad Soemitro dalam bukunya yang berjudul “Pajak dan Pembangunan” ada dua, yaitu :

1. Fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*). Dalam fungsi ini pungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.
2. Fungsi mengatur (*regularend*). Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembebasan pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang

dari masyarakat dan mengeluarkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih baik, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Ada beberapa fungsi pajak sebagai berikut:

- 1. Fungsi anggaran (budgeter).** Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara, maka pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara. Demi perkembangan negara, maka pengeluaran besar seperti pembangunan nasional dan biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, negara harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan negara melalui uang pajak.
- 2. Fungsi mengatur (regulasi).** Pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya. Contohnya seperti untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah meningkatkan harga bea masuk untuk produk dari luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan kompetisi harga yang ketat dengan produk luar negeri. Contoh lainnya dengan keringanan pajak, pemerintah dapat menarik investasi modal baik dalam

negeri maupun luar negeri agar perekonomian Indonesia semakin produktif.

3. **Fungsi stabilitas.** Dengan pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang berhubungan stabilitas perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan peningkatan pajak, maka jumlah uang yang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara dalam deflasi maka pemerintah dapat menurunkan pajak.
4. **Fungsi redistribusi pendapatan (pemerataan).** Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat.

(<https://www.aturduit.com/articles/pengertian-jenis-manfaat-fungsi-pajak-indonesia/>)

2.1.1.4. Asas–Asas Pemungutan Pajak

Didalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asa – asas pungutan pajak (Mardiasmo, 2003 : 7), yaitu :

1. Asas kebangsaan. Bahwa pajak pendapatan dipungut bagi orang – orang yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Asas domisili (tempat tinggal) Pajak pendapatan dipungut bagi orang – orang yang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan.
3. Asas sumber penghasilan. Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek – subyek tempat tinggal. Disamping asas–asas berpedoman pada hal tersebut diatas, ada pungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

Ada beberapa teori pajak yang dilontarkan dari jaman ke jaman, yaitu :

1. Asas sumber penghasilan. Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentungannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas – tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.
2. Teori kepentingan. Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenerkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing – masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang – orang beserta harta bendanya.

3. Teori bakti. Menurut teori ini seorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap – tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori daya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk setiap orang, jadi beban pajak harus sama sesuai dengan pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

2.1.1.5. Terori Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum lahirnya Undang – Undang Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia telah ada IPEDA yaitu iuran pembangunan daerah. Akan tetapi landasan hukum IPEDA kurang jelas. Dan selain IPEDA masih banyak punutan lain yang obyeknya sama yaitu tanah dan bangunan sehingga memberatkan masyarakat, antara lain pajak rumah tangga, pajak kekayaan pajak jalan, pajak hasil bumi dan lain – lain. Oleh karena itu dikeluarkanlah Undang – Undang nomor 12 tahun 1985 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan disempurnakan dengan Undang – Undang nomer 12 tahun 1994.

2.1.1.6. Dasar Hukum Pajak Bumi dan bangunan

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 1994.

Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah dimengerti dan adil
4. Menghindari pajak berganda

Pengertian bumi adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Secara umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk pekarangan, swah, empang, perairan pedalaman, serta laut di wilayah Indonesia. Pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar rumah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, darmaga
- g. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

2. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperlukan faktor – faktor sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pamanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain – lain

2.1.2. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (lebih dikenal dengan istilah PBB) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas harta tidak gerak berupa bumi dan bangunan. Pajak ini termasuk pajak obyektif karena yang dipentingkan adalah keadaan obyeknya, bukan subyeknya. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat didaerah yang bersangkutan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Secara lebih umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk tanah pekarangan, sawah, empang, dan sebagainya.

Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan

pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rohmawati dan Rasmini, 2012).

Dengan diundangkannya undang – undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah, dimana pemerintah mengadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya dibidang perpajakan sehingga mewujudkan perluasan dan penigkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Keadaan untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu rakyat / penduduk yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat / penduduk itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita – cita rakyat / penduduk hidup dalam negara yang adil makmur dalam lingkup nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945. setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingan sendiri dari generasi ke generasi.

Sebagai warga negara kita semua harus menyadari kewajiban – kewajiban kita terhadap negara sebagai imbalan atas perlindungan dan hak – hak yang diberikan negara terhadap kita. Dengan lain perkataan “ tidak sepatutnya kita

menerima atau menuntut berbagai hak dari negara, sedangkan kita mengabaikan kewajiban – kewajiban kita terhadap negara “. Sebagai insan Pancasila kita harus pandai menerima dan pandai pula memberi dan ini namanya “ pandai bergotong royong dan dalam kehidupan bermasyarakat “. Kita menghendaki agar negara menciptakan bagi kita semua kehidupan yang adil makmur lahiriah batiniah dan kita harus mewujudkan kewajiban – kewajiban kita terhadap negara dengan sebaik – baiknya. Negara telah

memberikan hasil – hasil pembangunan melalui kegiatan pemerintahan yang meliputi segala bidang ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sehingga kehidupan kita semua menjadi maju dan berkembang dalam suatu negara yang aman dan kuat bebas dari segala gangguan dan rongrongan dan untuk itu kita harus sadar akan kewajiban – kewajiban kita semua terhadap negara, terutama dalam soal pembiayaannya, karena semua hasil pembangunan harus dibiayai. Salah satu kewajiban kita dalam hal ini ialah sadar dan penuh tanggung jawab menyerahkan sejumlah uang pajak yang diatur oleh undang – undang.

Kepatuhan membayar pajak mengandung unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek pajak terhadap obyek pajak.
2. Adanya sikap setuju dari subyek.

3. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan sikap yang telah dimilikinya

Perilaku wajib pajak meliputi:

1. Pendaftaran NOP dan Pengisian SPOP. Nilai Obyek Pajak (NOP) adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek menurut ketentuan Undang – undang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Waktu pembayaran. Mengingat pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pelaksanaan pembangunan, maka dalam membayar pajak hendaknya tepat waktu, karena membayar Pajak Bumi dan Bangunan melewati batas waktu pembayaran akan menghambat pembangunan. Setiap wajib pajak menurut SPPT, mereka harus membayar pajak terhutangnya dalam waktu 6 bulan terhitung sejak saat diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Sehingga apabila wajib pajak terlambat membayar pajaknya akan dikenakan denda.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut (Herryanto dan Toly, 2013).

1. Sosialisasi langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib

pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *early tax education*, *tax goes to school* atau *tax goes to campus*, klinik pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.

2. Sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

2.1.3. Teori tentang kompensasi

2.1.3.1. Pengertian kompensasi

Pada dasarnya manusia bekerja juga ingin memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah seorang karyawan mulai menghargai kerja keras dan semakin menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan dan karena itulah perusahaan memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan yaitu dengan jalan memberikan kompensasi. Salah satu cara manajemen

untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi (Mathis dan Jackson, 2000).

Hani Handoko (1993) menyatakan bahwa kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Kompensasi acapkali juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi (Mutiar S. Panggabean, 2002). Selain itu dalam buku Malayu S.P. Hasibuan (2002) terdapat beberapa pengertian kompensasi dari beberapa tokoh yaitu :

1. Menurut William B. Werther dan Keith Davis kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Baik upah per jam ataupun gaji periodic didesain dan dikelola oleh bagian personalia.
2. Menurut Andrew F. Sikula kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap segai suatu balas jasa atau ekuivalen.

Pengertian kompensasi juga terdapat pada berbagai literatur yang dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain:

1. Menurut Bejo Siswanto (2003) kompensasi merupakan istilah luas yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan organisasi.
2. Menurut Dessler (1997) kompensasi karyawan adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu.

3. Menurut Hani Handoko (1993) kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.

2.1.3.2. Tujuan Diadakan Pemberian Kompensasi

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002), tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah:

1. Ikatan Kerja Sama

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. Kepuasan Kerja

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.

3. Pengadaan Efektif

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang *qualified* untuk perusahaan akan lebih mudah.

4. Motivasi

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya.

5. Stabilitas Karyawan

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena *turn-over* relatif kecil.

6. Disiplin

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.

7. Pengaruh Serikat Buruh

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.

8. Pengaruh Pemerintah

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

Sistem Kompensasi

Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan adalah:

1. Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi (gaji, upah) ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan.

2. Sistem Hasil (Output)

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi/upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram.

3. Sistem Borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.

Pada dasarnya semua badan usaha memberikan kompensasi kepada karyawannya bertujuan untuk menghargai dan memberi balas jasa atas semua yang telah dilakukan karyawan tersebut terhadap badan usaha baik itu tenaga, waktu, dan pikiran. Gary Dessler (2005) menyatakan "*Compensation experts therefore argue that managers should understand the motivational bases of pay-for-performance plans*"

Iskandar Putong & Cecep Hidayat (2010) menyatakan bahwa "Pemimpin harus peka terhadap perbedaan kebutuhan individu diantara bawahan, dan harus diberikan imbalan sesuai kebutuhannya. Tujuan imbalan adalah agar bawahan termotivasi untuk meningkatkan prestasi demi produktivitas organisasi".

Hani Handoko (2001) : "Pemberian kompensasi terbukti efektif dalam pemeliharaan tenaga kerja dengan memotivasi karyawan mencapai tingkat prestasi kerja yang lebih tinggi." dan R.Wayne Mondy dkk (1999) Menyatakan "*Compensation is the total of all rewards provided to employees in return for their services*"

Menurut Sofyandi (2008), "Tujuan diadakannya pemberian kompensasi adalah: 1). Untuk menjalin ikatan kerja sama antara pimpinan dengan karyawan.

Artinya bahwa dengan terjalannya kerja sama secara formal akan terbentuk komitmen yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang harus dipikul masing-masing. 2). Memberikan kepuasan kepada karyawan. Artinya bahwa melalui kepuasan yang dirasakan para karyawan, maka karyawan akan memberikan prestasinya yang terbaik. 3). Untuk memotivasi karyawan dalam bekerja. Artinya agar karyawan bersemangat dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, 4). Untuk menciptakan disiplin bagi karyawan”

Sehubungan dengan tujuan pemberian kompensasi, Suprihanto (2000) menyatakan bahwa:

a. Fungsi Kompensasi Secara umum adalah:

1. Untuk mengalokasikan sumberdaya manusia secara efisien khususnya angkatan kerja.
2. Untuk menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan efektif.
3. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya.

b. Tujuan Kompensasi adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomis atau memberikan rasa aman di bidang ekonomi (*economic security*) bagi karyawan.
2. Untuk mengkaitkan penerimaan, kontribusi, dan produktivitas karyawan.

3. Untuk mengkaitkan penerimaan dengan sukses finansial badan usaha.
4. Untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pemberian kompensasi pada para karyawan.

2.1.3.3. Jenis-jenis Kompensasi

Leap dan Crino (1993) mengelompokkan jenis-jenis kompensasi sebagai berikut:

- a. **Wages an salary**, Upah (*wages*) merupakan pembayaran atas pekerjaan yang berdasarkan waktu per jam atau per hari, sedangkan gaji (*salary*) merupakan pembayaran atas pekerjaan yang berdasarkan minggu, bulan, atau tahun.
- b. **Incentive programs**, merupakan kompensasi tambahan diluar gaji atau upah, program insentif ini berupa bonus atau kepemilikan saham badan usaha.
- c. **Employee benefit programs**, program ini diberikan dalam bentuk asuransi, uang saku liburan, dan uang pensiun.
- d. **Perquisites**, merupakan suatu penghasilan

Menurut Gary Dessler (dikutip oleh Lies Indriyatni, 2009) kompensasi mempunyai tiga komponen sebagai berikut :

1. Pembayaran uang secara langsung (*direct financial payment*) dalam bentuk gaji, dan intensif atau bonus/komisi.
2. Pembayaran tidak langsung (*indirect payment*) dalam bentuk tunjangan dan asuransi.

3. Ganjaran non finansial (*non financial rewards*) seperti jam kerja yang luwes dan kantor yang bergengsi.

2.1.4. Teori Tentang Kinerja

2.1.4.1. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2011) Menurut Bernardin & Russel (2003) untuk mengukur kinerja karyawan dapat digunakan beberapa kriteria kinerja, antara lain :

Kualitas merupakan tingkatan di mana proses atau hasil dari penyelesaian suatu kegiatan mendekati sempurna.

1. Kuantitas merupakan produksi yang dihasilkan dapat ditunjukkan dalam satuan mata uang, jumlah unit, atau jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan.
2. Ketepatan Waktu merupakan di mana kegiatan tersebut dapat diselesaikan, atau suatu hasil produksi dapat dicapai, pada permulaan waktu yang ditetapkan bersamaan koordinasi dengan hasil produk yang lain dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan lain.
3. Efektivitas Biaya merupakan tingkatan di mana sumber daya organisasi, seperti manusia, keuangan, teknologi, bahan baku dapat dimaksimalkan dalam arti untuk memperoleh keuntungan yang paling tinggi atau

mengurangi kerugian yang timbul dari setiap unit atau contoh penggunaan dari suatu sumber daya yang ada.

4. Hubungan Antar Perseorangan merupakan tingkatan di mana seorang karyawan mampu untuk mengembangkan perasaan saling menghargai, niat baik dan kerjasama antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain dan juga pada bawahan.

Selain itu Mathis dan Jackson (2006) menjelaskan ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan dan dukungan organisasi yang diterimanya. Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai karyawan dengan standar pekerjaan. bila hasil kerja yang diperoleh sampai atau melebihi standar pekerjaan dapat dikatakan kinerja seorang karyawan termasuk pada kategori baik (Bangun,2006).

Sedangkan kinerja karyawan menurut Henry Simamora (2004) adalah tingkat hasil kerja karyawan dalam pencapaian persyaratan pekerjaan yang diberikan. Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting yaitu:

1. Tujuan. Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personel.

2. Ukuran. Ukuran dibutuhkan untuk mengetahui apakah seorang personel telah mencapai kinerja yang diharapkan, untuk itu kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan personal memegang peranan penting.
3. Penilaian. Penilaian kinerja reguler yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan kinerja setiap personel. Tindakan ini akan membuat personel untuk senantiasa berorientasi terhadap tujuan dan berperilaku kerja sesuai dan searah dengan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Rita Swietenia (2009) manfaat kinerja pegawai antara lain adalah untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi, untuk menentukan target atau sasaran yang nyata, lalu untuk pertukaran informasi antara tenaga kerja dan manajemen yang berhubungan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

Adapun indikator kinerja karyawan menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005) adalah sebagai berikut :

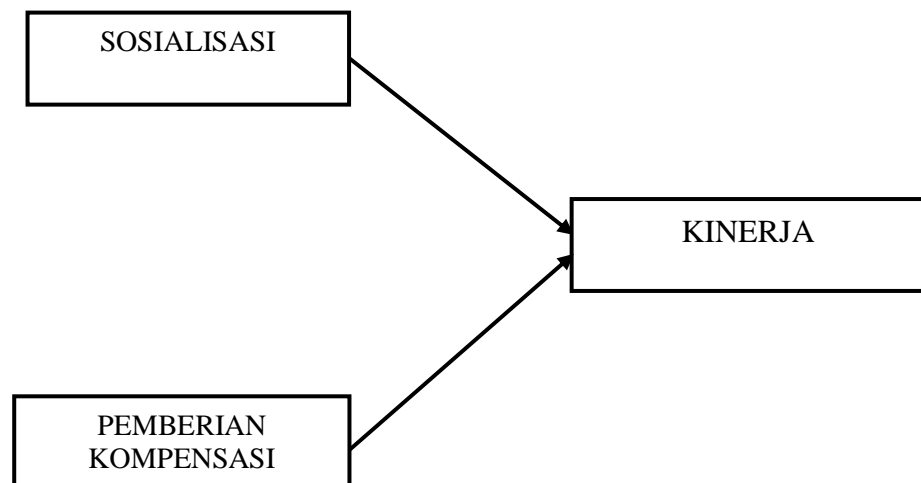
1. Mampu meningkatkan target pekerjaan
2. Mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
3. Mampu menciptakan inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan
4. Mampu menciptakan kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan
5. Mampu meminimalkan kesalahan pekerjaan

2.2. Kerangka Berpikir

Kinerja yang tinggi dari seorang kepala desa khususnya kinerja dalam pemungutan pajak tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya sendiri namun

banyak hal yang mempengaruhi seperti sosialisasi, sosialisasi yang baik dan tepat yang dilakukan oleh pihak terkait akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, dimana hal ini akan dapat meningkatkan kinerja kepala desa dalam memungut pajak, begiru juga dengan program pemerintah seperti program pemberian kompensasi atau pemberian hadiah kepada kepala desa yang memiliki kinerja yang baik dalam memungut pajak akan menjadi pemicu bagi kepala desa untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara jelas kerangka berpikir penelitian digambarkan seperti pada Gambar 2.1. dibawah ini.



Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir

2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

7. Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir.
8. Pemberian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir
9. Sosialisasi dan pemberian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berupa deskriptif kuantitatif, Nazir (2005, 54) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian kuantitatif mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti penelitian kuantitatif menggunakan instrumen – instrumen formal, standar dan bersifat mengukur (Sukmadinata,2006:95).

3.2. Variabel dan Defenisi Operasional

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X), Variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sosialisasi (X₁) dan Pemberian hadiah (X₂), variabel terikat adalah Kinerja kepala desa (Y).

Definisi operasional variabel penelitian dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.
Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran
Sosialisasi (X ₁)	Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rohmawati dan Rasmini, 2012).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan sosialisasi 2. Media Sosialisasi 3. Manfaat Sosialisasi 	Skala Likert
Kompensasi (X ₂)	Adalah segala bentuk balas jasa finansial dan pelayanan yang tangible (nyata), serta keuntungan yang diterima karyawan sebagai bagian dari suatu hubungan pekerjaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan 2. Honor Kepanitiaan 3. Gaji Pokok 4. Insenti 	Skala Likert
Kinerja (Y)	Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target Penerimaan 2. Tepat waktu 3. Menciptakan kreativitas 4. Meminimalkan kesalahan 	Skala Likert

3.3. Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan dan juga studi dokumentasi. Data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif yang merupakan satuan angka yang menunjukkan nilai besaran variabel, dan data kualitatif yang digunakan adalah untuk memahami fakta-fakta yang terdapat dibalik data kuantitatif.

Jenis sumber data yang dikumpulkan penelitian ini adalah:

1) Data primer yaitu data yang diperoleh dari daftar pertanyaan (*questionnaire*) yang diberikan kepada responden yaitu kepala desa di kecamatan Balige. Kuesioner yang diberikan kepada responden berisikan tentang variabel-variabel yang diteliti yaitu sosialisasi pajak, pemberian kompensasi dan kinerja kepala desa. Selain data primer yang diperoleh melalui daftar pertanyaan kepada responden, data primer juga diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepada pimpinan organisasi, dan lain-lain.

2) Data skunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, akan tetapi data hasil olahan dari pengambilan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain dari penelitian terdahulu berupa jurnal, literatur media cetak majalah dan media elektronik internet.

Penelitian ini dilakukan kepada kepala desa di kecamatan balige kabupaten Tobasamosir. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Pebruari 2020.

3.4. Populasi, Sampel, dan teknik penarikan sampel

3.4.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala desa di kecamatan balige yang berjumlah 37 orang.

3.4.2. Sampel dan cara penentuan sampel

Untuk alasan akurasi hasil penelitian maka seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel (sampel jenuh) hal ini juga didasarkan karena jumlah populasi yang tidak terlalu banyak.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Daftar pertanyaan (*questionnaire*) yang diberikan kepada kepala desa di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir yang dijadikan menjadi responden.
2. Wawancara (*Interview*) kepada pihak yang berkompeten atau berwenang untuk memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh penelitian ini.
3. Studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan mempelajari beberapa dokumen yang relevan dan mendukung penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Uji Hipotesis Pertama

$H_1 : P_{x_1,y} \neq 0$ sosialisasi pajak berpengaruh positif dan Signifikan

terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir.

$H_1 : P_{x_1,y} = 0$ Sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif dan Signifikan

terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir

Uji Hipotesis Kedua

$H_1 : P_{x_2,y} \neq 0$ Pemberian kompensasi positif dan Signifikan

terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir

$H_1 : P_{x_2,y} = 0$ pemberian kompensasi tidak berpengaruh positif dan

Signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir

Uji Hipotesis Ketiga

$H_1 : P_{x_{1,2},y} \neq 0$ Sosialisasi pajak dan pemberian kompensasi berpengaruh

positif dan Signifikan secara simultan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir

$H_1 : P_{x_{1,2},y} = 0$ Sosialisasi pajak dan pemberian kompensasi tidak

berpengaruh positif dan Signifikan secara simultan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir.

3.7. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa alat uji statistik regresi linier berganda dapat digunakan atau tidak.

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat memiliki data yang berdistribusi normal atau tidak, menurut Sugiono (2005)

Uji normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov-Smirnov Jika angka signifikansi yang ditunjukkan dalam tabel lebih kecil dari alpha 5%, maka dikatakan tidak memenuhi asumsi normalitas, sedangkan sebaliknya jika angka signifikansi di dalam tabel lebih besar dari alpha 5% maka data sudah memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2005).

Cara lain yang sering digunakan adalah dengan melihat tampilan grafik histogram yang memberikan pola distribusi normal karena meyebar secara merata ke kiri dan kekanan. Atau dapat juga kita lihat dari grafik Normal P-P plot.

Jika Grafik Normal Plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa model garis regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.7.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dipergunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel *independent* yang memiliki kemiripan dengan variabel *independent* lain dalam satu model yang dapat menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara variabel *independent* tersebut.

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling terkait dalam suatu model regresi. Masalah multikolinearitas tidak dijumpai

pada regresi sederhana karena dalam regresi sederhana hanya melibatkan satu variabel independen saja.

Pengujian multikolinieritas pada usulan penelitian ini dilakukan dengan melihat *collnarity statistic* dan nilai koefisien korelasi diantara variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.

Multikolinieritas terjadi apabila (1) nilai *tolerance* ($Tolerance < 0.10$) dan (2) *Variance inflation faktor* ($VIF > 10$).

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji Park atau uji White.

Salah satu cara yang lain yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji *glejser* (glejser test), yaitu

dengan menguji hubungan antara absolut residual model (selisih $Y^*_{\text{Observasi}}$ dengan Y^*_{Prediksi}) dengan setiap variabel independennya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kecamatan Balige

Balige adalah sebuah kecamatan dan juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Indonesia. Kecamatan Balige juga merupakan daerah wisata karena terletak di tepi Danau Toba. Terdapat Museum Batak, Museum T.B. Silalahi Center, dan Makam Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII di kecamatan ini.

Kecamatan Balige memiliki luas wilayah 91.05 km² atau 4,50% dari total luas Kabupaten Toba. Kecamatan Balige berada pada 2°15' - 2°21' Lintang Utara dan 99°00' - 99°11' Bujur Timur. Kecamatan Balige berada di atas sekitar 905 hingga 1.200 meter dari permukaan laut.

Batas wilayah kecamatan Balige adalah sebagai berikut:

Utara Danau Toba

Timur Kecamatan Laguboti

Selatan Kabupaten Tapanuli Utara

Barat Kecamatan Tampahan

Adapun peta kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir digambarkan pada gambar 4.1 berikut ini:



Gambar 4.1
Peta Kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir

Kecamatan Balige terdiri dari 29 desa dan 6 kelurahan yang terbagi habis dalam 132 dusun/lingkungan. Kelurahan Napitupulu Bagasan adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Kecamatan Balige. Desa Huta Namora merupakan desa dengan wilayah terluas yaitu 13,67 km² atau 15,01% dari total luas Kecamatan Balige, sementara Desa Tambunan Sunge merupakan desa terkecil yaitu 0,30 km² atau 0,33% dari total luas Kecamatan Balige. Desa Huta Namora merupakan desa yang paling jauh dari ibu kota Kecamatan Balige yaitu berjarak sekitar 13,5 kilometer.

Mayoritas penduduk Kecamatan Balige berasal dari suku Toba. Mayoritas penduduk Kecamatan Balige memeluk agama Kristen. Di Kecamatan Balige terdapat 55 sarana ibadah yang terdiri dari 48 bangunan Gereja, 4 Masjid, dan 3 Langgar.

Pada tahun 2015, terdapat 52 bangunan sekolah di Kecamatan Balige yang terdiri dari 31 sekolah SD, 8 sekolah SMP, 4 sekolah SMA, 7 SMK, dan 2 Perguruan Tinggi. Salah satu Sekolah Menengah Atas yang terkenal dari Balige adalah SMA Negeri 2 Balige di Saposurung yang bepelatihan dengan Asrama Yayasan Tunas Bangsa Saposurung Balige. SMA Negeri 2 Balige adalah salah satu SMA terbaik di Provinsi Sumatra Utara.

Kecamatan Balige memiliki 80 unit sarana kesehatan yang terdiri dari:

- unit Rumah Sakit, terletak di Kelurahan Balige III.
- unit Puskesmas, terletak di Desa Hinalang Bagasan dan Kelurahan Pardede Onan.
- unit Puskesmas Pembantu (Pustu), terletak di Desa Baruara, Bonan Dolok III, Lumban Gaol, Parsuratan, Saribu Raja Janji Maria, dan Sibuntuon.
- 18 unit Poskesdes, tersebar secara di 14 desa dan kelurahan.
- 53 unit Posyandu, tersebar secara merata di masing-masing desa dan kelurahan.

Sektor pertanian dan perkebunan rakyat merupakan penghasilan utama mayoritas penduduk di Kecamatan Balige. Produk unggulan pertanian dari Kecamatan Balige adalah padi sawah dan jagung. Dari jenis ternak besar yang diusahakan di Kecamatan Balige pada umumnya adalah kerbau dan sapi.

Sedangkan pada ternak kecil, yang paling dominan diusahakan adalah ternak babi. Untuk pemeliharaan pada ternak unggas, masyarakat di Kecamatan Balige umumnya memelihara ternak ayam dan itik

Beberapa desa di Kecamatan Balige yang berbatasan dengan Danau Toba memiliki potensi sebagai destinasi objek wisata alam, seperti Pantai Lumban Bulbul di Desa Lumban Bulbul maupun Pantai Lumban Silintong di Desa Lumban Silintong. Di Kecamatan Balige juga terdapat Museum Batak T.B. Silalahi Center yang berisikan barang-barang peninggalan sejarah di tanah Batak. Makam Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII terletak di Soposurung, Balige yang juga dijadikan sebagai objek wisata

(https://id.wikipedia.org/wiki/Balige,_Toba#Geografi)

4.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

4.2.1. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang artinya sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2003). Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas yang rendah (Azwar, 2003). Uji validitas ini dilakukan kepada 30 orang responden diluar responden yang dijadikan sampel dalam penelitian, uji validitas ini dilakukan terhadap pegawai yang tidak diikutkan dalam sampel penelitian ini dalam hal ini dilakukan dicamatan Porsea kecamatan

ini dipilih karena dianggap memiliki karakteristik yang tidak jauh beda dengan kecamatan Balige. Karena penelitian ini adalah penelitian dengan sampel jenuh maka peneliti melakukan uji validitas di inas Perdagangan.

Pengujian uji validitas dan reliabilitas untuk pertanyaan atau instrument penelitian ini dilakukan dengan bantuan program pengolahan data yaitu SPSS versi 25, hal ini dilakukan untuk keakuratan hasil pemngujian dan kemudahan pengolahan data.

Uji validitas dapat dilihat dengan menggunakan koefisien korelasi *product moment*. Adapun rumus untuk mengetahui koefisien korelasi product moment (r) adalah sebagai berikut (Azwar, 2003) :

$$r_{xy} = \frac{\sum XY - (\sum X) (\sum Y) / n}{[\sum X^2 - (\sum X)^2 / n] [\sum Y^2 - (\sum Y)^2 / n]}$$

Keterangan :

X dan Y : Skor masing-masing variabel

n : Banyaknya sampel

Teknik pengujian validitas dengan menggunakan tingkat signifikan 5% untuk mengetahui keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan cara mengkorelasikan antara skor ítem pertanyaan terhadap skor total. Apabila nilai *total pearson correlation* > 0,3, atau probabilitas kurang dari 0,05 maka ítem tersebut valid (arikunto).

4.2.1.1. Pengujian validitas Instrumen Variabel Sosialisasi Pajak

Hasil pengujian validitas instrument variabel Sosialisasi Pajak dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Sosialisasi Pajak

No	Pertanyaan/Pernyataan	<i>Corrected Item total Correlaion</i>	<i>Sig. (1 – tailed)</i>	Keterangan
1	Pemerintah Kabupaten Tobasamosir sering melakukan sosialisasi pajak langsung desa kami.	0,518	0,000	Valid
2	Pemerintah Kabupaten Tobasamosir sering melakukan sosialisasi pajak secara tidak langsung (misalnya spanduk, brosur dll)	0,533	0,000	Valid
3	Media sosialisasi pajak yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir cukup banyak.	0,523	0,000	Valid
4	Media sosialisasi pajak yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir cukup beragam.	0,591	0,000	Valid
5	Media sosialisasi pajak yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir menurut saya sangat tepat	0,619	0,000	Valid
6	Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir mampu meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak didesa saya.	0,612	0,000	Valid
7	Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir mempermudah masyarakat dalam membayar pajak (secara administratif)	0,486	0,000	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, diperoleh hasil pengujian instrument variabel sosialisasi pajak secara keseluruhan memiliki nilai *Corrected Item Total Correlation* yang lebih besar dari 0,30. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrument pernyataan atau pertanyaan dari variabel Sosialisasi Pajak yang digunakan adalah valid dan instrument ini dapat digunakan dalam

penelitian, selain itu hal ini juga diperkuat oleh nilai signifikansi (1-tailed) yang seluruhnya dibawah 0.05.

4.2.1.2. Pengujian validitas Instrumen Variabel kompensasi

Hasil pengujian validitas instrument variabel kompensasi dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel kompensasi

No	Pertanyaan/Pernyataan	<i>Corrected Item total Correlaion</i>	<i>Sig. (1 – tailed)</i>	Keterangan
1	Penghargaan yang diberikan oleh Pemkab Tobasa menjadi semangat bagi saya dalam memungut pajak.	0,527	0,000	Valid
2	Penghargaan yang diberikan oleh Pemkab kepada saya sesuai dengan kinerja saya sebagai pemungut pajak.	0,473	0,000	Valid
3	Honor yang saya terima atas kepanitiaan yang berhubungan dengan pajak cukup besar.	0,607	0,019	Valid
4	Pemberian honor atas kepanitiaan yang berhubungan dengan pajak cukup adil.	0,627	0,000	Valid
5	Saya menerima gaji yang cukup sebagai kepala desa.	0,488	0,000	Valid
6	Gaji yang saya terima setiap bulan sesuai dengan pekerjaan saya.	0,511	0,000	Valid
7	Insentif dari pemungutan pajak yang saya terima cukup besar.	0,502	0,000	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dipeoleh hasil pengujian instrument variabel kompensasi secara keseluruhan memiliki nilai *Corrected Item Total Correlation* yang lebih besar dari 0,30. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrument pernyataan dari variabel kompensasi yang digunakan

adalah valid dan instrument ini dapat digunakan dalam penelitian, selain itu hal ini juga diperkuat oleh nilai signifikansi (1-tailed) yang seluruhnya dibawah 0.05.

4.2.1.3. Pengujian validitas Instrument Variabel Kinerja

Hasil pengujian validitas instrument variabel kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Instrument Variabel Kinerja

No	Pertanyaan/Pernyataan	<i>Corrected Item total Correlaion</i>	<i>Sig. (1 – tailed)</i>	Keterangan
1	Saya selalu mampu mencapai target penerimaan jumlah pajak di desa saya.	0,664	0,000	Valid
2	Saya selalu mampu mencapai target pemungutan jumlah wajib pajak di desa saya.	0,524	0,000	Valid
3	Saya selalu mampu memungut pajak dengan tepat waktu	0,732	0,000	Valid
4	Saya selalu berusaha mencari cara yang baru dalam pemungutan pajak didesa saya.	0,525	0,000	Valid
5	Saya melakukan banyak pendekatan agar warga desa saya bersedia membayar pajak	0,627	0,001	Valid
6	Saya paham tentang peraturan daerah mengenai pemungutan pajak	0,523	0,000	Valid
7	Saya sangat jarang melakukan kesalahan dalam pemungutan pajak di desa saya.	0,557	0,006	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diperoleh hasil pengujian instrument variabel kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak di kecamatan balige secara keseluruhan memiliki nilai *Corrected Item Total Correlation* yang lebih besar dari 0,30. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrument pernyataan dari variabel kinerja yang digunakan adalah valid dan instrument ini dapat digunakan dalam penelitian, selain itu hal ini juga diperkuat oleh nilai signifikansi (1-tailed) yang seluruhnya dibawah 0.05.

4.2.2. Pengujian Reliabilitas

Tingkat konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama dinamakan reliabilitas. Jika suatu alat ukur dipakai dua kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran relative konstan, maka alat ukur tersebut reliabel. Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrument pengukur yang baik. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas instrument dalam penelitian ini dilakukan atau dianalisis dengan teknik *Cronbach Alfa* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alfa* $>0,60$ (ghozali, 2005).

Menurut Ghozali (2005), "Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, yaitu; 1) *Repeated Measure* atau pengukuran ulang; 2) *One Shot* atau pengukuran sekali saja".

Sekaran (2000) menyatakan bahwa "*Reliabilities less than 0,60 are considered to be poor those in the 0,7 range, acceptable and those over 0,80 good*". Artinya adalah reliabilitas yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik sedangkan 0,7 dapat diterima dan seterusnya 0,8 keatas dinyatakan baik.

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini seperti pada Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's		N	Keterangan
	Alpha	Of Items		
1. Variabel Sosialisasi pajak	0.713	8		Reliabel
2. Variabel kompensasi	0.714	8		Reliabel
3. Variabel Kinerja	0.727	8		Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data Diolah)

Dari tabel diatas diketahui bahwa seluruh instrumen atau pertanyaan adalah reliabel.

4.3. Penjelasan Responden Atas Variabel Penelitian

4.3.1. Penjelasan Responden Atas Variabel Sosialisasi pajak

Tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan yang diberikan untuk variabel Sosialisasi pajak (X_1) adalah seperti pada Tabel 4.5 yang disajikan kedalam distribusi frekuensi.

Tabel 4.5.
Penjelasan Responden atas Variabel Sosialisasi pajak

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Pemerintah Kabupaten Tobasamosir sering melakukan sosialisasi pajak langsung desa kami.	0	0,00	3	8,11	1	2,70	20	54,05	13	35,14
Pemerintah Kabupaten Tobasamosir sering melakukan sosialisasi pajak secara tidak langsung (misalnya spanduk, brosur dll)	0	0,00	1	2,70	2	5,41	23	62,16	11	29,73

Media sosialisasi pajak yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir cukup banyak.	0	0,00	1	2,70	4	10,81	22	59,46	10	27,03
Media sosialisasi pajak yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir cukup beragam.	1	2,70	0	0,00	6	16,22	26	70,27	4	10,81
Media sosialisasi pajak yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir menurut saya sangat tepat	0	0,00	0	0,00	6	16,22	21	56,76	10	27,03
Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir mampu meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak didesa saya.	1	2,70	2	5,41	10	27,03	19	51,35	5	13,51
Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir mempermudah masyarakat dalam membayar pajak (secara administratif)	0	0,00	0	0,00	7	18,92	25	67,57	5	13,51

Sumber: Hasil Penelitian 2020 (data diolah)

Dari tabulasi diatas diketahui bahwa pilihan yang paling banyak dipilih oleh responden (kepala desa di kecamatan Balige) adalah pilihan setuju dan selanjutnya pilihan sangat setuju terhadap seluruh pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai sosialisasi pajak, yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak sudah sering dilakukan oleh pemerintah di kecamatan Balige, dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah juga sudah tepat dari segi media yang digunakan juga dari segi kuantitas sosialisasi yang dilakukan.

Dari tabulasi diatas salah satu hal yang mendapat reaksi kurang positif adalah mengenai sosialisasi pajak yang menyadarkan masyarakat di kecamatan Balige terhadap kesadaran membayarr pajak dimana pertanyaan ini dipilih kurang setuju oleh 27,03 % kepala desa yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak

dengan menggunakan media yang tepat dan juga kuantitas sosialisasi pajak yang cukup belum benar-benar merubah polah pikir masyarakat secara keseluruhan di kecamatan Balige khususnya mengenai perubahan pola pikir terhadap kesadaran membayar pajak.

4.3.2. Penjelasan Responden Atas Variabel Kompensasi

Tanggapan/jawaban responden terhadap daftar pertanyaan yang diberikan peneliti untuk variabel Kompensasi (X_2) adalah seperti pada Tabel 4.6 yang disajikan kedalam distribusi frekuensi.

Tabel 4.6.
Penjelasan Responden atas Variabel Kompensasi

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Penghargaan yang diberikan oleh Pemkab Tobasa menjadi semangat bagi saya dalam memungut pajak.	1	2,70	0	0,00	2	5,41	26	70,27	8	21,62
Penghargaan yang diberikan oleh Pemkab kepada saya sesuai dengan kinerja saya sebagai pemungut pajak.	0	0,00	3	8,11	2	5,41	22	59,46	10	27,03
Honor yang saya terima atas kepanitiaan yang berhubungan dengan pajak cukup besar.	1	2,70	4	10,81	9	24,32	18	48,65	5	13,51
Pemberian honor atas kepanitiaan yang berhubungan dengan pajak cukup adil.	1	2,70	3	8,11	4	10,81	23	62,16	6	16,22
Saya menerima gaji yang cukup sebagai kepala desa.	1	2,70	5	13,51	17	45,95	12	32,43	2	5,41
Gaji yang saya terima setiap bulan sesuai dengan pekerjaan saya.	1	2,70	4	10,81	18	48,65	10	27,03	4	10,81
Insentif dari pemungutan pajak yang saya terima cukup besar.	1	2,70	4	10,81	9	24,32	18	48,65	5	13,51

Sumber: Hasil Penelitian 2020 (data diolah)

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa masih cukup banyak responden atau kepala desa yang memilih pilihan kurang setuju yang menunjukkan reaksi yang kurang positif terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai kompensasi hal ini menjelaskan bahwa secara umum kepala desa tidak mendapatkan kompensasi yang cukup dari pekerjaannya sebagai pemungut pajak didaerahnya masing-masing.

Kompensasi yang diterima oleh kepala desa dari pekerjaannya sebagai pemungut pajak sangat minim bahkan sangat tidak sesuai dengan beban pekerjaan kepala desa, hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan penerimaan pajak di kecamatan Balige dan kabupaten Tobasamosir secara umum.

4.3.3. Penjelasan Responden Atas Kinerja

Tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan yang diberikan untuk kinerja (Y) adalah seperti pada Tabel 4.7 yang disajikan kedalam distribusi frekuensi.

Tabel 4.7
Penjelasan Responden atas Kinerja

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Saya selalu mampu mencapai target penerimaan jumlah pajak di desa saya.	1	2,70	2	5,41	14	37,84	18	48,65	2	5,41
Saya selalu mampu mencapai target pemungutan jumlah wajib pajak di desa saya.	0	0,00	3	8,11	16	43,24	16	43,24	2	5,41
Saya selalu mampu memungut pajak dengan tepat waktu	0	0,00	2	5,41	10	27,03	25	67,57	0	0,00

Saya selalu berusaha mencari cara yang baru dalam pemungutan pajak di desa saya.	0	0,00	0	0,00	3	8,11	25	67,57	9	24,32
Saya melakukan banyak pendekatan agar warga desa saya bersedia membayar pajak	0	0,00	0	0,00	1	2,70	22	59,46	14	37,84
Saya paham tentang peraturan daerah mengenai pemungutan pajak	0	0,00	0	0,00	5	13,51	27	72,97	5	13,51
Saya sangat jarang melakukan kesalahan dalam pemungutan pajak di desa saya.	0	0,00	3	8,11	8	21,62	21	56,76	5	13,51

Sumber: Hasil Penelitian 2020 (data diolah)

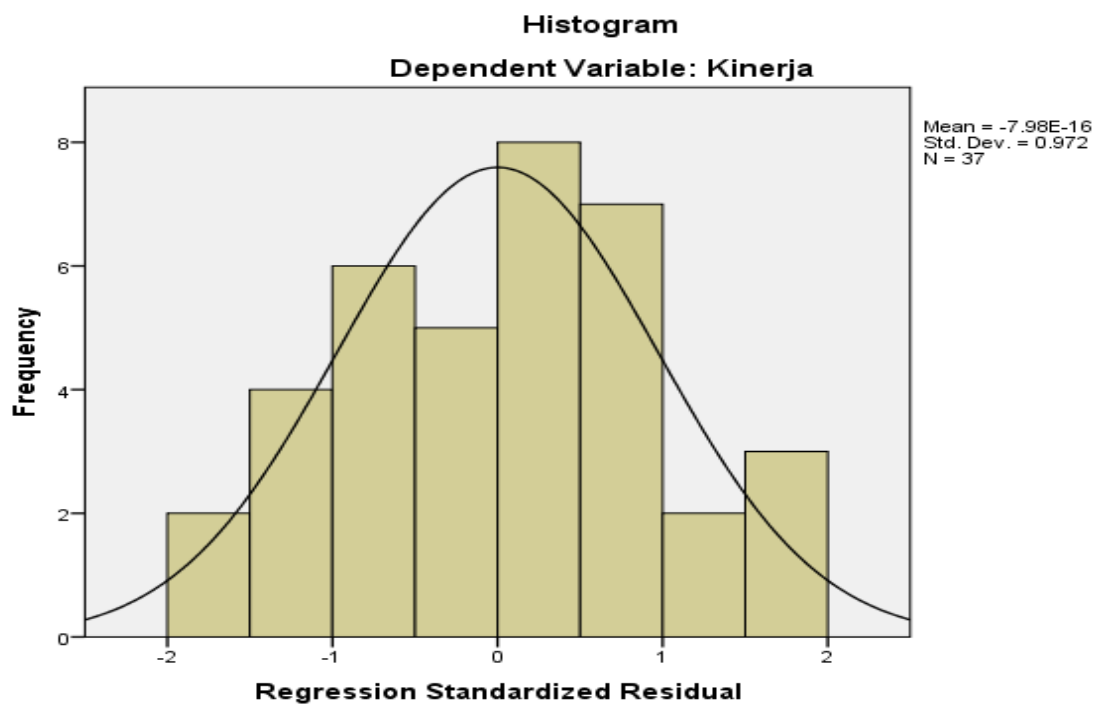
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pilihan yang paling banyak dipilih oleh kepala desa adalah pilihan setuju yang menunjukkan bahwa kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak sudah lamanya baik namun ada beberapa hal yang kurang baik yaitu mengenai pertanyaan nomor 1, 2 dan nomor 3 dimana ketiga pertanyaan ini dipilih kurang setuju oleh cukup responden hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak di kecamatan balige belum mencapai target dari jumlah pajak yang diterima oleh negara dan juga tidak tercapai dari segi jumlah wajib pajak yang menyetorkan pajaknya.

Selain masalah tidak tercapainya target jumlah wajib pajak dan juga target jumlah pajak yang diterima, kinerja kepala desa dari segi ketepatan waktu juga masih rendah artinya kepala desa belum mampu memungut pajak dengan waktu yang tepat yang artinya banyak wajib pajak atau masyarakat yang telat membayar pajak bumi dan bangunan.

4.4. Uji Asumsi Klasik

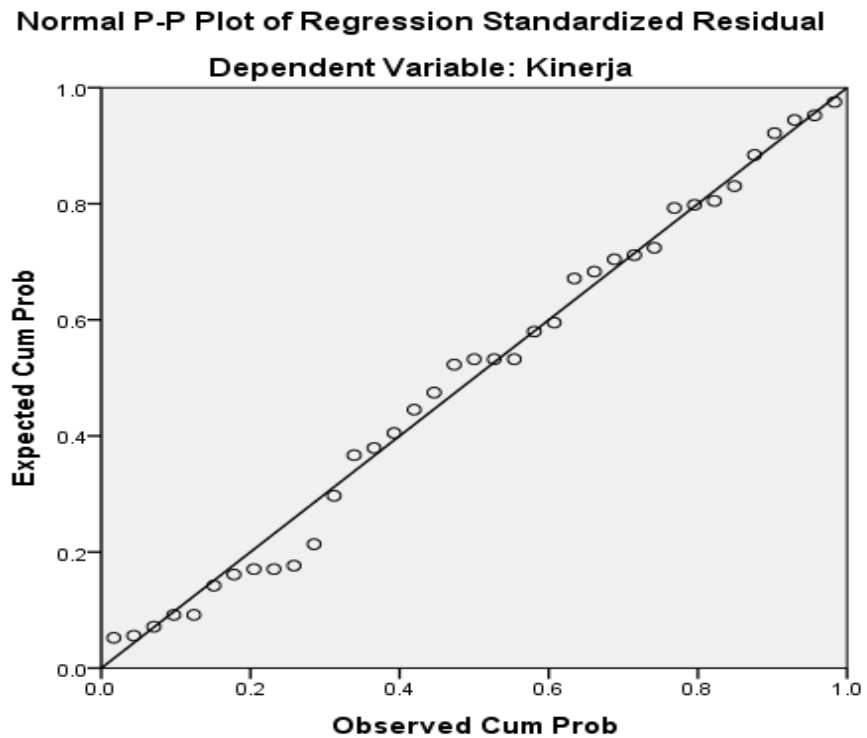
4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat tampilan grafik Histogram dan Grafik P-P Plot, tampilan grafik histogram terdapat pada Gambar 4.2 dimana grafik ini memberikan pola distribusi normal karena menyebar secara merata ke kiri dan ke kanan. ^κ



Sumber: Hasil Penelitian 2020 (Data diolah)

Gambar 4.2
Uji Normal



Gambar 4.3

Uji Normal P-P Plot

Pada gambar 4.3 grafik P-P Plot diatas ini terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa model garis regresi memenuhi asumsi normalitas, yang artinya bahwa data tersebut dapat digunakan dalam analisis selanjutnya dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji Multikolonierisitas

Pengujian multikolonierisitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat *collnarity statistic* dan nilai koefisien korelasi diantara variabel bebas. Uji multikolonierisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonierisitas terjadi apabila (1) nilai *tolerance* ($Tolerance < 0.10$) dan (2) *Variance inflation faktor* ($VIF > 10$).

Hasil pengujian multikolonierisitas penelitian ini terlihat pada Tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 4.8:
Hasil Uji Multikolonierisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	8.794	3.006			
1 Sosialisasi	.536	.157	.589	.441	2.266
Kompensasi	.117	.105	.192	.441	2.266

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

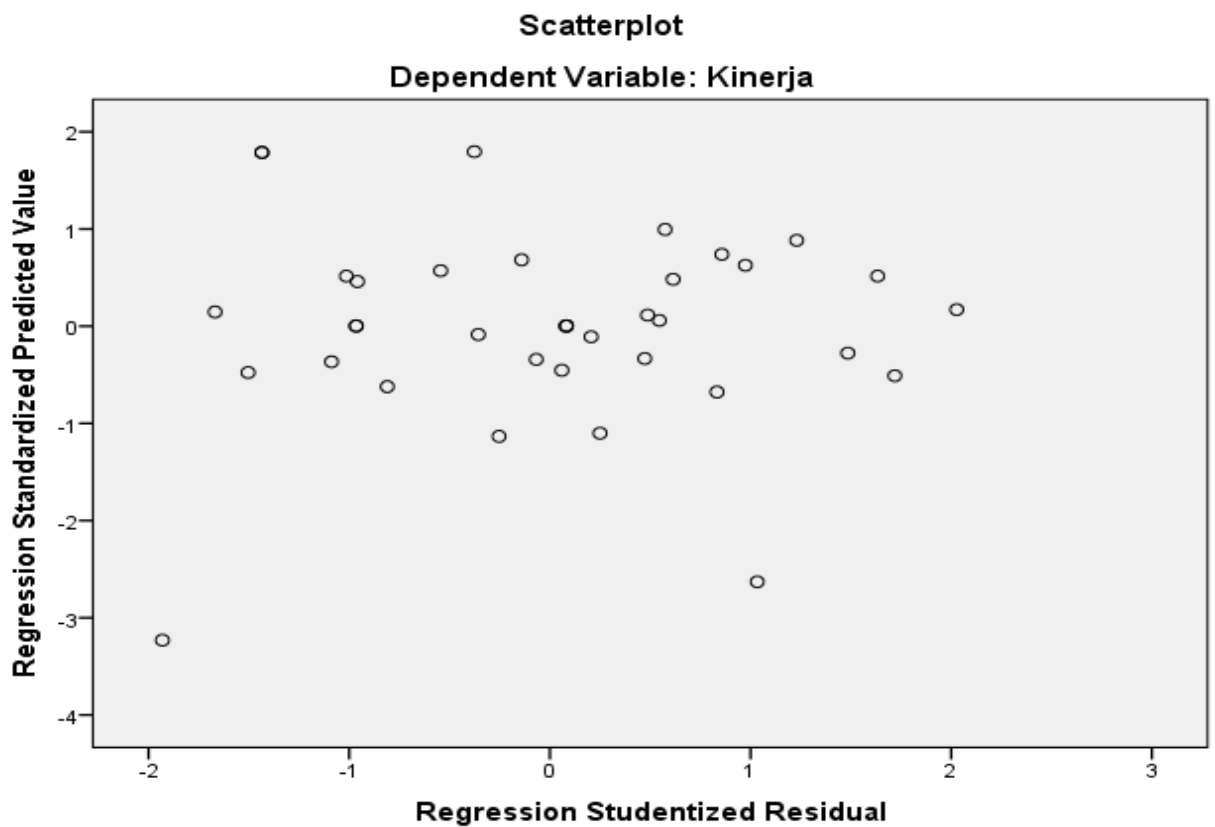
Berdasarkan Tabel 4.8 di diatas diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel sosialisasi pajak, kompensasi dan kinerja kepala desa lebih kecil dari 10. Sedangkan nilai *tolerance*-nya lebih besar dari 0.10, hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak saling berkolerasi atau tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, sehingga data dapat digunakan untuk dianalisis.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model linier klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah *homoskedastik* yaitu semua gangguan memiliki varians yang sama, Gujarati (2005).

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan gambar scatterplot, apabila titik-titik menyebar

dibawah dan diatas angka 0, serta tidak membentuk pola maka dapat disimpulkan model regresi terhindar dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian terlihat pada Gambar 4.4 dibawah ini :



Sumber : Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Gambar 4.4:
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas dari hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dibawah dan diatas angka 0, serta tidak membentuk pola maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat unsur heteroskedastisitas.

4.5. Hasil Penelitian

4.5.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model, yaitu variasi variabel bebas yaitu sosialisasi pajak dan kompensasi dalam menerangkan variasi variabel terikatnya yaitu kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige. Nilai koefisien determinasi R^2 dapat dilihat dalam Tabel 4.9:

Tabel 4.9
Koefisien Determinan (Uji R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.744 ^a	.553	.527	1.936	1.577

a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Sosialisasi

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,553 atau 55,3% yang menunjukkan kemampuan variabel sosialisasi pajak dan kompensasi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada kinerja kepala desa sebesar 55,5%, sedangkan sisanya sebesar 44,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini, yang mungkin mempengaruhi kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan seperti tingkat pendidikan masyarakat, kepemimpinan kepala desa, fasilitas dan factor-faktor yang lain.

4.5.2. Uji Serempak (Uji F)

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan untuk uji simltan adalah sebagai berikut

jika nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

jika nilai F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dan atau

jika nilai signifikan lebih besar dari alpha maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

jika nilai signifikan lebih kecil dari alpha maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Berdasarkan Tabel 4.10 di bawah ini dapat diketahui bahwa $F_{hitung} = 21,019$ dan $F_{tabel} = 3,28$ dalam hal ini F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan nilai signifikan adalah 0.00 lebih kecil dari nilai alpha 0.05, sehingga keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Diterimanya hipotesis alternatif menunjukkan variabel bebas yaitu Sosialisasi Pajak dan kompensasi secara simultan mampu menjelaskan keragaman dari variabel terikat yaitu kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak di kecamatan Balige maka dalam hal ini variabel sosialisasi pajak dan kompensasi secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak di kecamatan Balige.

Hasil pengujian tersebut disajikan pada Tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10

Uji Serempak (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	157.577	2	78.789	21.019	.000 ^b
Residual	127.450	34	3.749		
Total	285.027	36			

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), Kompensasi, Sosialisasi

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

4.5.4. Uji Parsial (Uji t)

Sama halnya dengan pengujian hipotesis uji F di atas maka untuk menguji hipotesis pengaruh variabel sosialisasi pajak dan kompensasi secara parsial dilakukan uji t. Pengujian ini dilakukan dua arah, menggunakan tingkat signifikansi alpha 5% .

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} dengan kriteria keputusan adalah :

Jika nilai sig lebih besar dari alpa H_0 diterima atau H_1 ditolak

Jika nilai sig kecil dari alpa H_0 ditolak atau H_1 diterima

Dan atau

jika nilai signifikan lebih besar dari alpha maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

jika nilai signifikan lebih kecil dari alpha maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Adapun hasil pengujian uji parsial disajikan pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11
Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	8.794	3.006		2.926	.006		
1 Sosialisasi	.536	.157	.589	3.410	.002	.441	2.266
Kompensasi	.117	.105	.192	1.114	.273	.441	2.266

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 (data diolah)

Dari Tabel 4.11 di atas ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai sig untuk variabel sosialisasi pajak (0,002) lebih kecil dari alpha (0,05). dan juga nilai T_{hitung} 3,410 juga lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,92. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka H_0 ditolak dan H_1 diterima untuk variabel sosialisasi pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak di kecamatan Balige.

Pengaruh yang positif dan signifikan antara sosialisasi pajak terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan memberikan arti bahwa peningkatan kualitas sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah di kecamatan balige akan meningkatkan kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak secara signifikan, selain itu sosialisasi pajak yang kurang baik juga akan menurunkan kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak secara signifikan.

Pengaruh yang positif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi pajak menjadi faktor yang memiliki peran yang penting dalam

meningkatkan kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige.

2. Nilai sig untuk variabel kompensasi (0,273) lebih besar dari alpha (0,05) selain itu nilai t_{hitung} 1,114 juga lebih kecil dari nilai t_{tabel} 2,92. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka H_0 diterima dan H_1 ditolak untuk variabel kompensasi. Ditolaknya hipotesis alternatif menunjukkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak di kecamatan Balige atau dengan kata lain secara parsial kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak di kecamatan Balige.

Kompensasi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak di kecamatan Balige menjelaskan bahwa perbaikan terhadap kompensasi yang diberikan kepada kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige tidak akan mampu meningkatkan kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak di kecamatan Balige secara signifikan, hal ini tidak terlepas dari keadaan masyarakat di kecamatan Balige dimana kesadaran membayar pajak masih rendah sehingga peningkatan kompensasi yang diterima kepala desa dalam pemungutan pajak di kecamatan Balige tidak akan merubah kinerjanya secara signifikan.

Tidak signifikannya pengaruh kompensasi terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak di kecamatan Balige juga menjelaskan bahwa keberadaan kepala desa dalam hal ini kapasitas kepala desa tidak banyak mempengaruhi penerimaan pajak di kecamatan Balige, dimana kepala desa masih sulit merubah polah pikir masyarakat dalam hal kesadaran membanyar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige.
2. Kompensasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige.
3. Sosialisasi pajak dan kompensasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige.
4. Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,553 atau 55,3% yang menunjukkan kemampuan variabel sosialisasi pajak dan kompensasi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada kinerja kepala desa sebesar 55,5%, sedangkan sisanya sebesar 44,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini, yang mungkin mempengaruhi kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan seperti tingkat pendidikan masyarakat, kepemimpinan kepala desa, fasilitas dan faktor-faktor yang lain.

5.2 . Saran

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Balige sementara kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kepala desa, untuk itu peneliti memberikan beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Tobasamosir disarankan tetap memberikan sosialisasi pajak di kecamatan Balige namun sasaran utama sosialisasi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Pemerintah kabupaten Tobasamosir disarankan agar melatih kepala desa agar mampu menyadarkan masyarakat di desanya masing-masing tentang perlunya membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Pemerintah kabupaten Tobasamosir disarankan memberikan penghargaan kepada kepala desa dalam pemungutan pajak dalam bentuk nonfinansial.
4. Kepada kepala desa disarankan agar membantu pemerintah kabupaten dalam mensosialisasikan pajak bumi dan bangunan di desanya masing-masing.
5. Kepada kepala desa disarankan untuk ikut aktif secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
6. Kepada peneliti berikutnya disarankan agar menambah variabel yang lain dalam meneliti tentang kinerja kepala desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan seperti tingkat pendidikan masyarakat, kepemimpinan kepala desa, fasilitas dan variabel-variabel yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini. 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . E-Jurnal Akuntansi Universitas Unadaya. Vol. 1, No. 2 Desember 2012
- Bambang Guritno dan waridin (2005) Guritno,. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja.JRBI. Vol 1. No 1. Hal: 63-74.
- Bangun, W. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga
- Bedjo Siswanto (2003). Manajemen Kerja Indonesia (Pendidikan administrasi dan operatif) Jakarta:Bumi Aksara
- Bernardin, H. John, dan Joyce E.A Russel. (2003). Human resource management (An Experimental Approach International Edition). Mc. Graw-Hill Inc. Singapore.
- Dessler, Gary. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Bahasa Indonesia Jilid 2.Jakarta: Prenhallindo.
- Dessler Gary. 2005. Human Resource Management. Tenth edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey.
- Hani Handoko. 1993. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia Edisi 2. Yogyakarta: BPFE
- Handoko. T Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia , Bumi Aksara, Jakarta.
- Herryanto, M., dan Toly, A.A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen
Petra, Vol. 1(1).

- Iskandar Putong, Cecep Hidayat, 2010. Teori Kepemimpinan, MitraWacana Media, Jakarta.
- Leap, Terry L. Dan Crino, Michael D. (1993), Personnel/Human Resources Management. Second Edition. New York: Macmillan Publishing Company.
- Lies Indriyatni. 2009 .”Analisis Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Perawat Dengan Kepuasan Kerja Perawat Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variable Mediasi” jurnal ekonomimanajemen-akuntansi, no. 26, th. xvi, pp. 117-127
- Mangkunegara. 2011. Manajemen Sumber Daya Perusahaan. PT . Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan, edisi revisi tahun 2009.Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2000. Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
- Mondy R.Wayne, Robert M Noe, ShaneR. Premeaux. 1999 Human Resource Management. Seventh edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey.
- Moh. Nazir, 2005. Metode Penelitian. Penerbit Ghalia Indonesia. Anggota IKAPI.
- Mutiara S. Panggabean. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rita Swietenia. 2009. “Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap Disiplin Kerja Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang).” Jurnal Ekonomi – Manajemen – Akuntansi, No. 26, Th. XVI, pp. 96-116
- Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sofyandi, Herman. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suprihanto. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan

Waluyo, (2008), Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.

I. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang saudara anggap paling sesuai.
2. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban.
3. Setelah diisi mohon saudara berikan kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.
4. Pengembalian kuesioner ini paling lambat satu minggu setelah kuesioner ini saudara terima
5. Kriteria jawaban :

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Keterangan :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju | 4. Setuju |
| 2. Tidak Setuju | 5. Sangat Setuju |
| 3. Cukup Setuju | |

II. IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin

Laki-laki
Perempuan
2. Umur Tahun bulan
3. Masa Kerja Tahun..... bulan

III. DAFTAR KUESIONER

Keterangan :

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| STS = Sangat Tidak Setuju | TS = Tidak Setuju | |
| KS = Kurang Setuju | S = Setuju | SS = Sangat Setuju |

1. Sosialisasi Pajak

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1	Pemerintah Kabupaten Tobasamosir sering melakukan sosialisasi pajak langsung desa kami.					
2	Pemerintah Kabupaten Tobasamosir sering melakukan sosialisasi pajak secara tidak langsung (misalnya spanduk, brosur dll)					
3	Media sosialisasi pajak yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir cukup banyak.					

4	Media sosialisasi pajak yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir cukup beragam.					
5	Media sosialisasi pajak yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir menurut saya sangat tepat					
6	Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir mampu meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak didesa saya.					
7	Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tobasamosir mempermudah masyarakat dalam membayar pajak (secara administratif)					

2. Kompensasi

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1	Penghargaan yang diberikan oleh Pemkab Tobasa menjadi semangat bagi saya dalam memungut pajak.					
2	Penghargaan yang diberikan oleh Pemkab kepada saya sesuai dengan kinerja saya sebagai pemungut pajak.					
3	Honor yang saya terima atas kepanitiaan yang berhubungan dengan pajak cukup besar.					
4	Pemberian honor atas kepanitiaan yang berhubungan dengan pajak cukup adil.					
5	Saya menerima gaji yang cukup sebagai kepala desa.					
6	Gaji yang saya terima setiap bulan sesuai dengan pekerjaan saya.					
7	Insentif dari pemungutan pajak yang saya terima cukup besar.					

3. Kinerja

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya selalu mampu mencapai target penerimaan jumlah pajak di desa saya.					
2	Saya selalu mampu mencapai target					

	pemungutan jumlah wajib pajak di desa saya.					
3	Saya selalu mampu memungut pajak dengan tepat waktu					
4	Saya selalu berusaha mencari cara yang baru dalam pemungutan pajak di desa saya.					
5	Saya melakukan banyak pendekatan agar warga desa saya bersedia membayar pajak					
6	Saya paham tentang peraturan daerah mengenai pemungutan pajak					
7	Saya sangat jarang melakukan kesalahan dalam pemungutan pajak di desa saya.					

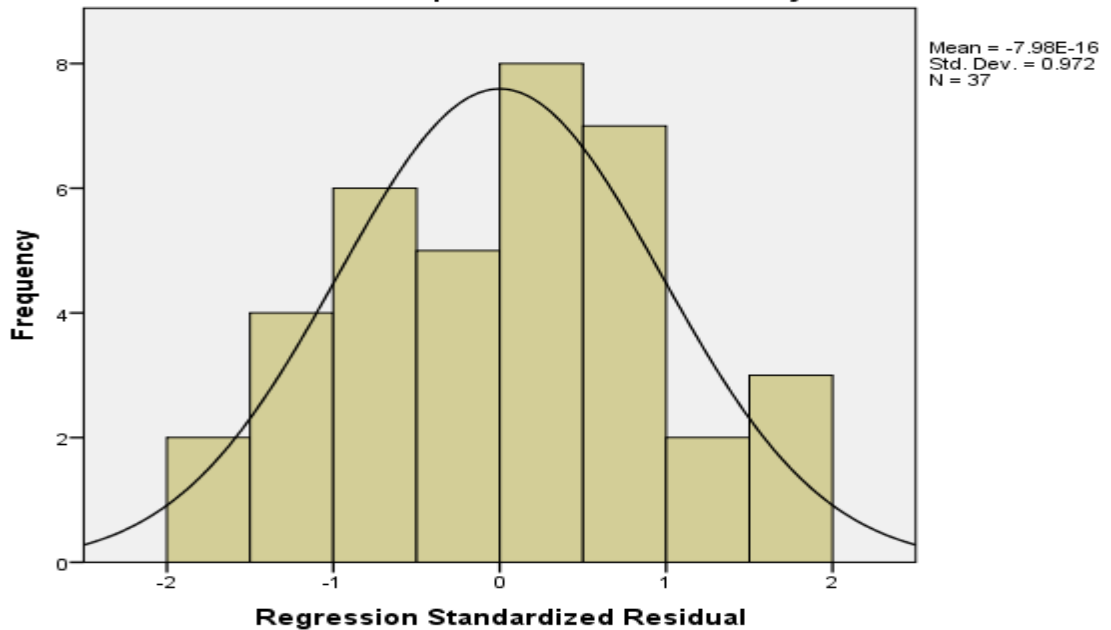
Lampiran 2. Hasil Pengujian Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi	37	18	35	28.05	3.091
Kompensasi	37	11	35	25.70	4.624
Kinerja	37	17	31	26.84	2.814
Valid N (listwise)	37				

Histogram

Dependent Variable: Kinerja



Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.744 ^a	.553	.527	1.936	1.577

a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Sosialisasi

b. Dependent Variable: Kinerja

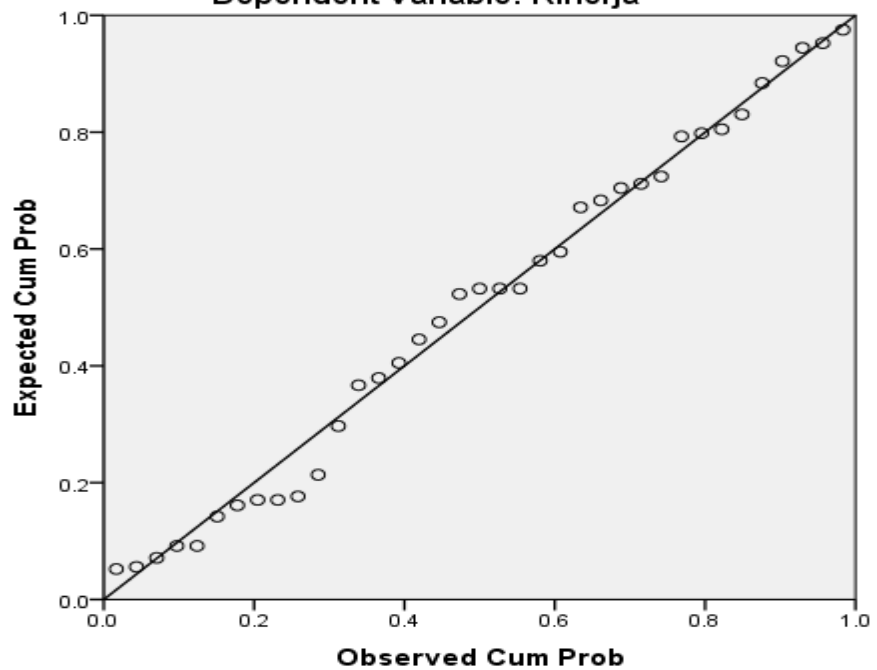
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	157.577	2	78.789	21.019	.000 ^b
	Residual	127.450	34	3.749		
	Total	285.027	36			

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), Kompensasi, Sosialisasi

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kinerja

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity
		B	Std. Error	Beta			Tolerance
1	(Constant)	8.794	3.006		2.926	.006	
	Sosialisasi	.536	.157	.589	3.410	.002	.441
	Kompensasi	.117	.105	.192	1.114	.273	.441

a. Dependent Variable: Kinerja

Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja

